

ANALISIS TINGKAT PENDIDIKAN DAN KEMISKINAN DI ACEH

M. Shabri Abd. Majid

Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, E-mail: hannanan@gmail.com

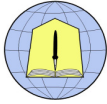
Abstrak :Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pendidikan di Aceh dan kaitannya dengan tingkat kemiskinan dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan kuantitatif sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dibandingkan dengan tingkat pendidikan penduduk di 34 Provinsi lainnya di Indonesia, indikator tingkat pendidikan penduduk Aceh seperti APK, AMH, ARLS, dan APM sudah jauh lebih baik dan bahkan berada di atas level nasional. Indikator tingkat pendidikan mayoritas kabupaten/kota di Aceh sudah cukup baik, namun mutunya masih sangat memprihatinkan. Mutu pendidikan Aceh berada di atas rangking 25 dari 34 Provinsi di Indonesia, padahal dana yang dialokasikan untuk sektor ini menempati rangking ketiga terbesar di Indonesia. Pembangunan sektor pendidikan belum merata antar kabupaten/kota di Aceh. Rendahnya tingkat pendidikan di sebagian kabupaten/kota di Aceh, khususnya di kabupaten yang baru dimekarkan telah menyebabkan tingkat kemiskinan masyarakat di kawasan tersebut sangat tinggi, yaitu melebihi 20 persen (melebihi tingkat kemiskinan nasional, 14,44persen). Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan tingkat dan mutu pendidikan di Aceh harus dilakukan: (1) Pemerintah harus mengadakan program-program peningkatan kualifikasi dan mutu tenaga pendidik dan pendistribusian guru berkualitas antar kabupaten/kota yang lebih merata; (2) Pemerintah harus mengalokasikan dana pembangunan Aceh untuk sektor pendidikan secara berkeadilan antarkota/kabupaten di Aceh; dan (3) Pemerintah Aceh, khususnya Dinas Pendidikan harus meningkatkan efisiensi, profesionalisme dan transparansi pengelolaan dana pendidikan.

Keywords: Pendidikan, Pembiayaan Pendidikan, Kemiskinan, Aceh.

PENDAHULUAN

Institusi pendidikan di Indonesia belum mampu bekerja optimal melahirkan sumber daya manusia yang mampuni. Kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. *Human Development Report (HDR)*, *United Nation Development Programme (UNDP)* melaporkan bahwa pada tahun 2011, peringkat Indeks Pengembangan Manusia (*Human Development Index*) Indonesia yang mencakupi komposisi peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala berada di urutan 124 dari 183 negara yang ada di dunia. Rangking Indeks Pengembangan Manusia Indonesia jauh berada di bawah Singapura (26), Brunei Darussalam (33), Malaysia (61), Thailand (103), Filipina (112), dan sedikit lebih baik dibandingkan dengan Vietnam (128) dan Myanmar (149).

Begitu juga untuk Indeks Pembangunan Pendidikan (*Education Development Index*) untuk semua atau *education for all* di Indonesia menurun dari peringkat 65 pada tahun 2010 ke peringkat 69 pada tahun 2011. Berdasarkan data dalam *Education For All (EFA) Global Monitoring Report (2011)*: "The

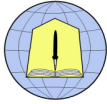


Hidden Crisis, Armed Conflict and Education” yang dikeluarkan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), menyebutkan bahwa Indeks Pembangunan Pendidikan berdasarkan data tahun 2008 adalah 0,934. Nilai ini menempatkan Indonesia di posisi ke-69 dari 127 negara di dunia. Posisi ini menempatkan Indonesia jauh tertinggal dari Brunei Darussalam yang berada di peringkat ke-34. Brunei Darussalam masuk kelompok pencapaian tinggi bersama Jepang, yang mencapai posisi nomor satu dunia. Adapun Malaysia berada di peringkat ke-65 atau masih dalam kategori kelompok pencapaian medium seperti halnya Indonesia. Posisi Indonesia jauh lebih baik dari Filipina (85), Kamboja (102), India (107), dan Laos (109). Penurunan Indeks Pembangunan Pendidikan ini terjadi terutama pada kategori penilaian angka bertahan siswa hingga kelas V SD. Kategori ini menunjukkan kualitas pendidikan di jenjang pendidikan dasar masih belum baik. Untuk pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), Badan Penelitian dan Pembangunan (Balitbang), Departemen Pendidikan Nasional (2003) melaporkan bahwa dari 146.052 SD di Indonesia, hanya terdapat delapan sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Primary Years Program* (PYP). Dan dari 20.918 SMP yang ada di Indonesia, hanya delapan sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Middle Years Program* (MYP). Sementara itu, dari 8.036 SMA yang terdapat di Indonesia, hanya tujuh sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Diploma Program* (DP).

Dibandingkan dengan negara Asia lainnya, menurut survei *Political and Economic Risk Consultant (PERC)*, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia, berada di bawah Vietnam. Akibat rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, maka Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia (*The World Economic Forum Swedia Report*, 2000). Indonesia pun hanya berpredikat sebagai *follower* bukan sebagai *leader* teknologi dari 53 negara di dunia.

Sebagai salah satu Provinsi di Indonesia, Aceh juga memiliki berbagai masalah menyangkut kualitas pendidikan. Aceh yang mendapat jatah dana pembangunan Rp 11,1 triliun pada tahun 2010, dan 30% dari jumlah tersebut harus dialokasikan untuk memajukan bidang pendidikan, namun kualitas pendidikan Aceh tergolong sangat rendah dibandingkan dengan 34 Provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Misalnya, prestasi siswa Aceh di bidang Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2011 hanya menduduki peringkat 25 di Indonesia. Fakta ini sungguh bertolak belakang dengan anggaran besar yang dimiliki Aceh saat ini.

Berdasarkan uraian singkat di atas, jelas terlihat bahwa tingkat dan kualitas pendidikan masyarakat Aceh jauh tertinggal dibandingkan dengan tingkat dan kualitas pendidikan di negara maju, dan bahkan juga jauh tertinggal dibandingkan dengan Provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Ketertinggalan tingkat dan kualitas pendidikan baik formal dan informal di Aceh, patut dipertanyakan. Apakah rendahnya mutu pendidikan di Aceh disebabkan oleh kualitas guru dan murid? Apakah daya tampung sekolah yang ada di Aceh, termasuk di pelosok-pelosok desa sudah memadai seiring dengan pertumbuhan penduduk? Sejauhmana pula ketersediaan sarana fisik dan perangkat lunak dalam menunjang proses belajar mengajar di sekolah-sekolah di Aceh seiring dengan penambahan penduduk? Bagaimana distribusi penduduk Aceh mengikuti tingkat pendidikan? Dan sejauhmana pula tingkat pendidikan di Aceh telah mampu mengurangi tingkat kemiskinan masyarakatnya? Apakah pembiayaan pendidikan yang relatif tinggi di Aceh berbanding lurus dengan peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan rakyat Aceh?



Dengan merujuk pada data sekunder, khususnya hasil Sensus 2010, penelitian ini tidak ditujukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, melainkan untuk:

1. menganalisis komposisi penduduk Aceh mengikut tingkat pendidikan;
2. menganalisis jumlah Angka Melek Aksara Penduduk, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM);
3. menganalisis pembiayaan pendidikan di Aceh; dan juga
4. melihat sejauhmana hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat kemiskinan rakyat Aceh.

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan dan manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai sumbangan ilmiah dalam melihat tingkat pendidikan dari sisi kajian demografi.
2. Melihat korelasi langsung antara jumlah pembiayaan pendidikan dengan tingkat dan kualitas penduduk Aceh.
3. Melihat kontribusi dunia pendidikan terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan di kalangan masyarakat Aceh.
4. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pengambil keputusan terkait bidang pendidikan dan kependudukan.

STUDI LITERATUR

Definisi Pendidikan

Sebagai Bapak Pelopor Pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia, Ki Hajar Dewantaramengartikan pendidikan "sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya". Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pendidikan "sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, dan pembuatan mendidik". Sementara itu, *Ensiklopedi Wikipedia* menyebutkan bahwa pendidikan "*is a social science that encompasses teaching and learning specific knowledge, beliefs, and skills*". Dewey (1944) menyebutkan bahwa "*education in its broadest, general sense is the means through which the aims and habits of a group of people lives on from one generation to the next*".

Sedangkan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) No. 2 tahun 1989, pendidikan adalah "usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang". Dalam UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003, pendidikan disebutkan sebagai "usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat".



Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat kita ketahui bahwa pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan sadar sebagai proses dari upaya untuk mencerdaskan manusia. Karena mulianya tujuan yang ingin dicapai pendidikan itu, maka bangsa Eropa sejak tahun 1952 telah menganggap bahwa pendidikan itu adalah hak setiap individu untuk mendapatkannya. Dalam Article 2 dari Protokol yang pertama *the European Convention on Human Rights* menjamin setiap individu untuk mendapat hak pendidikan. Begitu juga pada tingkat global, *the United Nations' International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* pada tahun 1966 juga menjamin setiap warga negara untuk mendapat hak pendidikan, yang dituangkan dalam Article 13.

Tujuan Pendidikan

Pendidikan bertujuan untuk menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas ke depan untuk mencapai suatu cita-cita yang di harapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan. Karena pendidikan itu biasanya akan memotivasi seseorang untuk menjadi lebih baik dalam segala aspek kehidupan di masa mendatang. Jadi, pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pentingnya pendidikan tercermin dalam UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

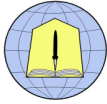
Pentingnya peranan pendidikan dalam mencerdaskan bangsa, telah lebih 1.400 tahun yang lalu diakui Islam. Ayat pertama yang diturunkan Allah, yaitu Surat Al-'Alaq telah menyerukan umat manusia untuk membaca dan belajar (*Iqra'*). Agar manusia berkualitas dan beretika, manusia harus memiliki modal, yaitu pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh melalui pendidikan, mulai dari program untuk anak-anak sampai dengan pelatihan dalam pekerjaan (*on the job training*) untuk para pekerja dewasa (Mankiw et al., 1992).

Untuk meningkatkan level modal manusia dibutuhkan investasi dalam bentuk guru, perpustakaan dan waktu belajar. Sukirno (2004) menjelaskan bahwa pendidikan merupakan satu investasi yang sangat berguna untuk pembangunan ekonomi. Di satu pihak untuk memperoleh pendidikan diperlukan waktu dan uang. Pada masa selanjutnya setelah pendidikan diperoleh, masyarakat dan individu akan memperoleh manfaat. Individu yang memperoleh pendidikan tinggi cenderung memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tidak berpendidikan. Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh. Peningkatan dalam pendidikan memberi beberapa manfaat dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan sekaligus dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

2.3 Indikator Tingkat Pendidikan

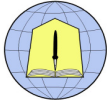
Tingkat dan kualitas pendidikan penduduk dapat diukur dengan beberapa indikator (Chamadi, 2005) berikut:

1. Angka Partisipasi Kasar (APK), diperoleh dengan membagi jumlah murid dengan jumlah penduduk menurut kelompok usia sekolah yang sesuai dikalikan 100 persen.



2. Angka Partisipasi Murni (APM) diperoleh dengan membagi jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu dengan jumlah penduduk menurut kelompok usia yang sama dikalikan 100 persen.
3. Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) diperoleh dengan membagi jumlah penduduk menurut usia sekolah dengan jumlah sekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai.
4. Angka Melanjutkan (AMI) diperoleh dengan membagi jumlah murid baru suatu jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah lulusan dari jenjang pendidikan satu tingkat di bawahnya dikalikan 100 persen.
5. Angka Putus Sekolah (APS) diperoleh dengan membagi jumlah murid yang keluar dari sistem pendidikan sebelum lulus selama satu tahun pengajaran tanpa ada surat keterangan pindah dari kepala sekolah dengan jumlah murid seluruhnya dikalikan 100 persen.
6. Angka Mengulang (AU) diperoleh dengan membagi jumlah murid yang mengulang dengan jumlah seluruh murid tahun sebelum pada jenjang pendidikan tertentu dikalikan 100 persen.
7. Angka Lulusan (AL) diperoleh dengan membagi jumlah murid yang berhasil menyelesaikan pendidikan untuk suatu jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah murid tingkat terakhir pada tahun sebelumnya dikalikan 100 persen.
8. Angka Partisipasi Pendidikan Swasta (APPS) diperoleh dengan membagi jumlah sekolah swasta dengan jumlah seluruh sekolah dikalikan 100 persen.
9. Rasio Input/Output (RIO) diperoleh dengan membagi jumlah lulusan tahun tertentu dengan murid baru tingkat I (tahun pertama memasuki proses pendidikan) pada jenjang pendidikan tertentu dikalikan 100 persen.
10. Rasio Murid dan Guru (RMG) diperoleh dengan membagi jumlah murid dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu.
11. Rasio Murid dan Sekolah (RMS) diperoleh dengan membagi jumlah murid dengan jumlah sekolah pada jenjang pendidikan tertentu.
12. Rasio Murid dan Kelas (RMK) diperoleh dengan membagi jumlah murid dengan jumlah sekolah pada jenjang pendidikan tertentu.
13. Rasio Kelas dan Ruang Kelas (RKRK) diperoleh dengan membagi jumlah murid dengan jumlah sekolah pada jenjang pendidikan tertentu.
14. Persentase Ruang Kelas Baik (PRKB) diperoleh dengan membagi jumlah ruang kelas milik yang berkondisi baik dengan seluruh jumlah ruang kelas milik pada jenjang pendidikan tertentu.
15. Persentase Guru Layak Mengajar (PGLM) diperoleh dengan membagi jumlah guru yang memiliki tingkat pendidikan yang sesuai untuk mengajar bidang studi tertentu pada jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah guru seluruhnya dikalikan 100 persen.

Karena keterbatasan data yang tersedia baik dalam Sensus 2010 maupun data sekunder lainnya yang dikeluarkan pemerintahan Aceh, maka dalam penelitian ini, tidak semua indikator tingkat pendidikan yang disebutkan di atas akan diteliti. Penelitian ini hanya menganalisis jumlah Angka Melek Huruf Penduduk (AMHP), Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).



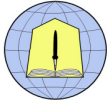
Pendidikan Aceh dalam Lintas Sejarah

Sejarah Aceh mencatat bahwa pendidikan telah berkembang sangat pesat di Aceh ketika masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Mengutip tulisan Abdul Majid (2004), Sofyan Sofyan Djalil (2006), Mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu dalam Orasi Ilmiahnya yang disampaikan pada Rapat Terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-45 Unsyiah pada 2 September 2006 menyebutkan bahwa penjelajah Perancis, Beaulieu, yang melawat Aceh pada abad ke-17, menyatakan bahwa pada kurun tersebut Aceh tidak mengenal lagi masyarakat buta huruf. Pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636), di Aceh telah berdiri dengan megahnya sebuah institusi pendidikan tinggi yang setingkat dengan Universitas yang diberi nama dengan Jami'ah Baiturrahman, yang berlokasi di Masjid Baiturrahman, masjid kebanggaan rakyat Aceh. Dalam sistem pendidikan di Jami'ah ini sudah diintegrasikan ilmu pendidikan umum dan agama untuk diajarkan kepada para mahasiswanya. Hal ini dapat dilihat dari nama ke-17 fakultas (*Daar*) yang ada pada saat itu, yaitu: (1) *Daar al-Tafsir wal Hadits* (Fakultas Tafsir dan Hadist); (2) *Daar al-Thib* (Fakultas Kedokteran); (3) *Daar al-Kimiya* (Fakultas Kimia); (4) *Daar al-Taarikh* (Fakultas Sejarah); (5) *Daar al-Hisaab* (Fakultas Matematika); (6) *Daar al-Siyasah* (Fakultas Ilmu Politik); (7) *Daar al-'Aqli* (Fakultas Ilmu Logika); (8) *Daar al-Zira'ah* (Fakultas Pertanian); (9) *Daar al-Ahkaam* (Fakultas Hukum); (10) *Daar al-Falsafah* (Fakultas Filosofi); (11) *Daar al-Kalam* (Fakultas Teologi); (12) *Daar al-Wizaarah* (Fakultas Ilmu Pemerintahan); (13) *Daar al-Khazanah Bait al-Mal* (Fakultas Keuangan/Akuntansi Negara); (14) *Daar al-Ardh* (Fakultas Pertambangan); (15) *Daar al-Nahwu* (Fakultas Sastra Arab); (16) *Daar al-Mazahib* (Fakultas Perbandingan Mazhab); dan (17) *Daar al-Harb* (Fakultas Ilmu Militer). Institusi pendidikan di Aceh yang sangat berwibawa ketika itu telah menjadi sentra pengembangan ilmu pengetahuan tidak hanya untuk Aceh saja, tetapi juga telah merambah kawasan regional manca negara. Tenaga pengajar dan guru besar Jami'ah Baiturrahman ini mencakup ulama-ulama besar yang bukan saja berketurunan Aceh, seperti Syeikh Nuruddin Ar-Raniry, Syeikh Syamsuddin As-Sumatrani dan juga Syeikh Hamzah Al-Fansury.

Pendidikan Aceh sekarang ini jauh tertinggal dari dunia maju dan berkembang lainnya, dan bahkan pendidikan Aceh juga tertinggal dari Provinsi-provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Rangka pendidikan Aceh berada di nomor 25, dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, padahal alokasi pendidikan Aceh mencapai Rp 3,33 triliun pada tahun 2010.

Pendidikan Sebagai Modal Pembangunan dan Kesejahteraan

Pendidikan merupakan indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa. Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu negara adalah tersedianya SDM yang berkualitas. Merujuk pada amanat UUD 1945 beserta amandemennya (Pasal 31, Ayat 2), maka melalui jalur pendidikan pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk Indonesia. Upaya percepatan peningkatan pendidikan penduduk mulai dilaksanakan pemerintah pada tahun 1973/1974, yaitu dengan menyebarkan pembangunan Sekolah Dasar (SD) ke seluruh pelosok negeri melalui program SD Inpres. Program wajib belajar 6 tahun dan 9 tahun, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA), dan berbagai program pendukung lainnya adalah bagian dari upaya pemerintah mempercepat peningkatan kualitas SDM, yang pada akhirnya akan menciptakan SDM yang tangguh, yang siap bersaing di era globalisasi. Peningkatan SDM sekarang ini lebih difokuskan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya



kepada penduduk untuk mengecap pendidikan, terutama kelompok penduduk usia sekolah (umur 7 – 24 tahun). SDM yang mampuni merupakan kontributor utama terhadap kemajuan sebuah bangsa.

Pertumbuhan ekonomi akan berkembang pesat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk sebuah negara jika didukung oleh masyarakatnya yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Teori pertumbuhan modern menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) melalui pendidikan dalam rangka mendorong dan meningkatkan produktivitas, dimana pertumbuhan produktivitas tersebut pada gilirannya merupakan motor penggerak pertumbuhan. Modal manusia dalam terminologi ekonomi digunakan untuk bidang pendidikan dan berbagai kapasitas manusia lainnya, yang ketika bertambah dapat meningkatkan produktivitas. Pendidikan memainkan kunci dalam kemajuan perekonomian di suatu negara. Pendidikan merupakan alat untuk mengadopsi teknologi modern, sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian. Pendidikan juga dapat dilihat sebagai komponen vital dalam pertumbuhan dan pembangunan sebagai input bagi fungsi produksi agregat (Todaro dan Smith, 2003).

Samuelson dan Nordhaus (2005) menyebutkan bahwa input tenaga kerja (sumber daya manusia) terdiri dari kuantitas dan keterampilan tenaga kerja. Banyak ekonomi percaya bahwa kualitas input tenaga kerja yakni keterampilan, pengetahuan dan disiplin tenaga kerja merupakan elemen paling penting dalam pertumbuhan ekonomi. Suatu negara yang mampu membeli berbagai peralatan canggih tapi tidak mempekerjakan tenaga kerja terampil dan terlatih tidak akan dapat memanfaatkan barang-barang modal tersebut secara efektif. Peningkatan melek huruf dan disiplin serta kemampuan menggunakan komputer sangat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan hubungan dua arah yang kuat. Di satu sisi pertumbuhan ekonomi menyediakan sumber-sumber yang memungkinkan terjadinya perkembangan secara berkelanjutan dalam pembangunan manusia. Sementara sisi lain pengembangan dalam kualitas modal manusia merupakan kontributor penting bagi pertumbuhan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Populasi Penelitian

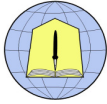
Penelitian ini dilaksanakan di provinsi Aceh, meliputi 23 Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat Provinsi Aceh yang berjumlah 4.486.570 (Sensus Penduduk, 2010).

Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini akan memanfaatkan data sekunder berupa hasil Sensus 2010 dan data-data sekunder relevan lainnya baik yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik Aceh, Aceh dalam Angka, maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh.

Analisis Data

Analisis tingkat pendidikan, pembiayaan pendidikan, dan juga kontribusi tingkat pendidikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh akan dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif



sederhana. Analisis trend dengan menggunakan Grafik dan Tabel akan mendominasi analisis dan pembahasan penelitian ini.

Output dan Outcome Penelitian

Output yang diharapkan dari kegiatan penelitian ini adalah tersedianya naskah yang membahas tentang analisis tingkat pendidikan di kalangan masyarakat Aceh, jumlah pembiayaan pendidikan dan juga hubungan antara tingkat pendidikan dan kemiskinan di Aceh yang dapat diakses oleh masyarakat, baik masyarakat awam maupun masyarakat akademis. Dengan demikian, dapat diketahui kualitas sumber daya manusia di Provinsi Aceh yang dilihat dari tingkat pendidikan penduduknya. Informasi lainnya yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sejauhmana efektifitas kebijakan pembiayaan pendidikan di Aceh serta sejauhmana tingkat pendidikan telah mampu mengurangi jumlah masyarakat miskin di Aceh. Sedangkan *Outcome* yang diharapkan dari penelitian ini adalah meningkatkan jumlah dan kualitas pendidikan masyarakat Aceh sehingga cita-cita pemerintah untuk mencerdaskan masyarakatnya menuju masyarakat sejahtera akan dapat direalisasikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

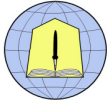
Gambaran Umum Penduduk Aceh

Sejak Januari 2004, provinsi Aceh dibagi menjadi 17 Kabupaten dan 4 Kota yang terdiri atas 257 kecamatan, 693 mukim dan 6.107 desa serta 112 kelurahan. Sebelumnya pada Mei 2003, Aceh berkembang menjadi 20 Kabupaten/Kota dari 10 Kabupaten/Kota. Pada tahun 2007, Aceh memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.223.833. Jumlah penduduk Aceh terus bertambah dengan tingkat rata-rata pertumbuhan penduduk sebanyak 0,86 persen pertahun. Pada tahun 2010, penduduk Aceh meningkat menjadi 4.494.410 jiwa, terdiri dari 2.248.952 jiwa laki-laki dan 2.245.458 jiwa perempuan. Ini berarti rata-rata 77 jiwa penduduk yang mengisi Provinsi Aceh per Kilometer.

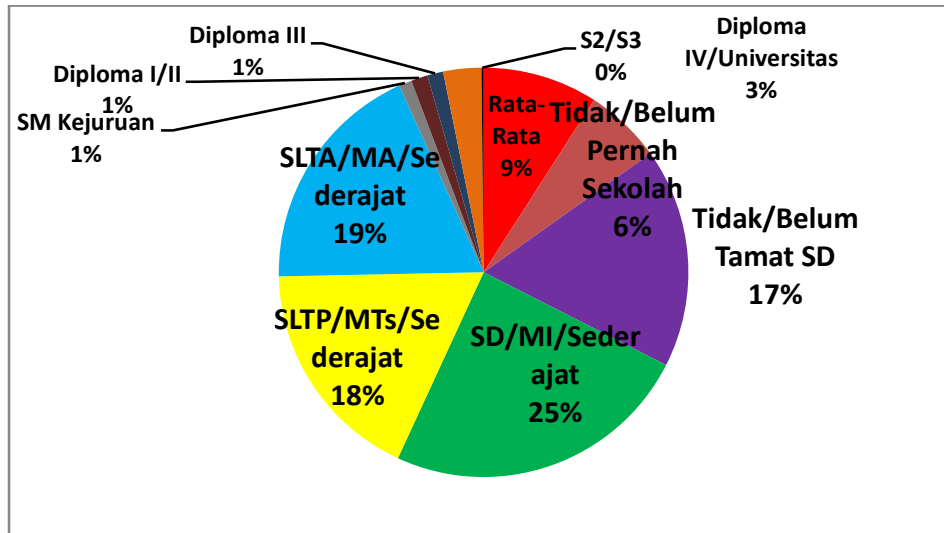
Tingkat Pendidikan Penduduk Aceh

Pendidikan merupakan faktor utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Aceh pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya, karena pendidikan menjadi kunci bagi pencapaian kemajuan bangsa. Tingkat pendidikan yang rendah telah menyebabkan rendahnya tingkat produktifitas yang berimbas pada buruknya tingkat penghasilan dan rendahnya kualitas kehidupan bangsa Indonesia.

Dunia pendidikan di Provinsi Aceh masih menghadapi banyak masalah, salah satunya adalah keluhan mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai serta diiringi dengan rendahnya mutu pendidikan di segala jenjang pendidikan. Untuk itu, berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintahan Aceh, diantaranya dengan mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi dan mutu tenaga pengajar, sehingga diharapkan dapat menciptakan lulusan yang lebih berkualitas yang dapat meningkatkan mutu SDM Aceh dengan alokasi dana otonomi khusus (otsus) di bidang pendidikan Aceh sebesar 20 persen pada tahun 2009-2012.



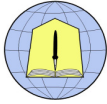
Gambar 1. Tingkat Pendidikan Penduduk Aceh Berumur 5 Tahun Ke atas Menurut Kabupaten/Kota



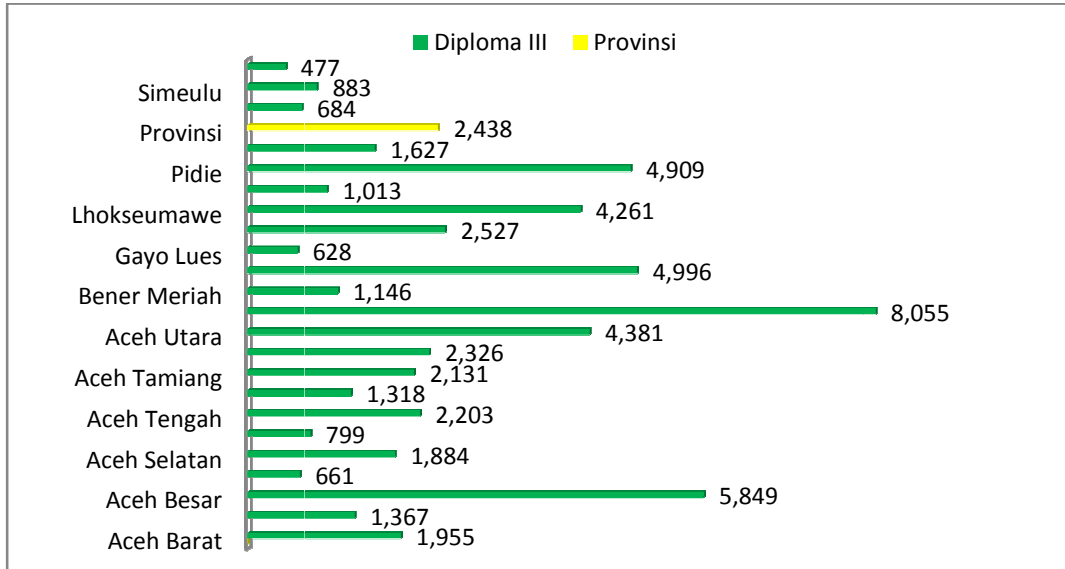
Sumber: Sensus Penduduk (2010), Aceh Dalam Angka (2011), dan BPS (2011).

Berdasarkan Gambar 1, komposisi penduduk Aceh yang berumur 5 tahun ke atas menurut wilayah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Provinsi Aceh berjumlah sebanyak 4,000,981, yang terdiri dari Tidak/Belum Pernah Sekolah, Tidak/Belum Tamat SD, SD/MI/Sederajat, SMP/MTsN/Sederajat, SMA/MA/Sederajat, Sekolah Menengah (SM) Kejuruan, Diploma I/II, Diploma III, Diploma IV, S2 dan S3. Persentase pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk yang berumur 5 tahun keatas di provinsi Aceh, seperti yang terlihat pada Gambar 1, dimana total pendidikan tertinggi yang ditamatkan dengan persentase angka tertinggi berada pada tingkat pendidikan SD/MI/Sederajat sebesar 25 persen atau 46,708 orang, sedangkan persentase angka terendah berada pada tingkat pendidikan S2/S3 yaitu sebesar 0 persen atau 315 orang, dan rata-rata persentase tingkat pendidikan provinsi Aceh yaitu sebesar 9 persen atau 17.396 orang.

Dari total penduduk berumur 5 tahun ke atas tersebut dapat dilihat bahwa penduduk yang berpendidikan Diploma III menurut wilayah/kabupaten di provinsi Aceh, yaitu dengan jumlah rata-rata 2,438, dimana total pendidikan tertinggi Diploma III yang ditamatkan dengan angka tertinggi terdapat di kota Banda Aceh yang berjumlah 8,055, sedangkan angka terendah terdapat di kabupaten Subulussalam yang berjumlah 477 (Gambar 2).



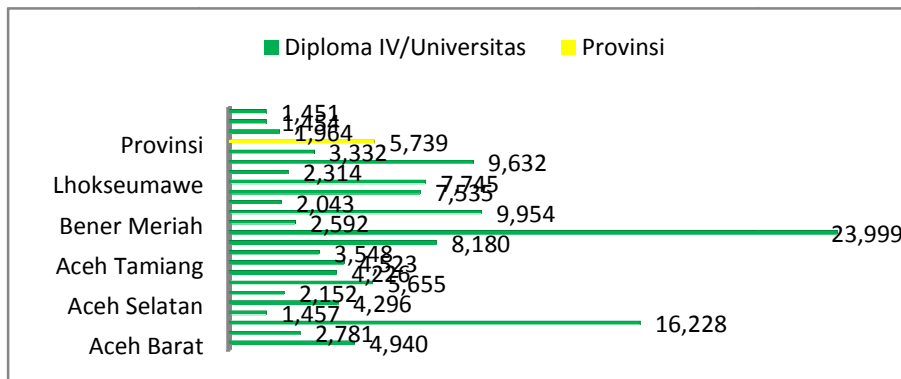
Gambar 2. Jumlah Penduduk Aceh yang Berpendidikan Diploma III (D3) Menurut Kabupaten/Kota



Sumber: Sensus Penduduk (2010), Aceh Dalam Angka (2011), dan BPS (2011).

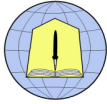
Sedangkan penduduk yang berpendidikan Diploma IV/S1 menurut wilayah/kabupaten di provinsi Aceh rata-rata berjumlah sebanyak 5,739, dimana total pendidikan tertinggi Diploma IV/S1 yang ditamatkan dengan angka tertinggi terdapat di kota Banda Aceh yang berjumlah 23,999, sedangkan angka terendah terdapat di kabupaten Subulussalam yang berjumlah 1,451 (Gambar 3).

Gambar 3. Jumlah Penduduk Aceh yang Berpendidikan Diploma IV (S1) Menurut Kabupaten/Kota



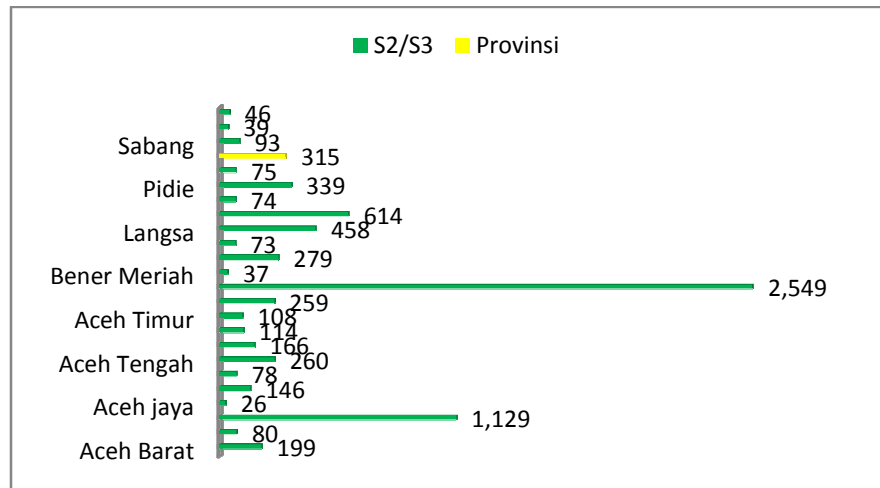
Sumber: Sensus Penduduk (2010), Aceh Dalam Angka (2011), dan BPS (2011).

Selanjutnya, penduduk Aceh yang berpendidikan S2/S3 menurut wilayah/kabupaten di provinsi Aceh rata-rata berjumlah 315, dimana total pendidikan tertinggi S2/S3 yang ditamatkan dengan angka



tertinggi terdapat di Kota Banda Aceh yang berjumlah 2,459, sedangkan angka terendah terdapat di kabupaten Aceh Jaya yang berjumlah 26 orang, seperti terlihat pada (Gambar 4).

Gambar 4. Jumlah Penduduk Aceh yang Berpendidikan S2/S3 Menurut Kabupaten/Kota

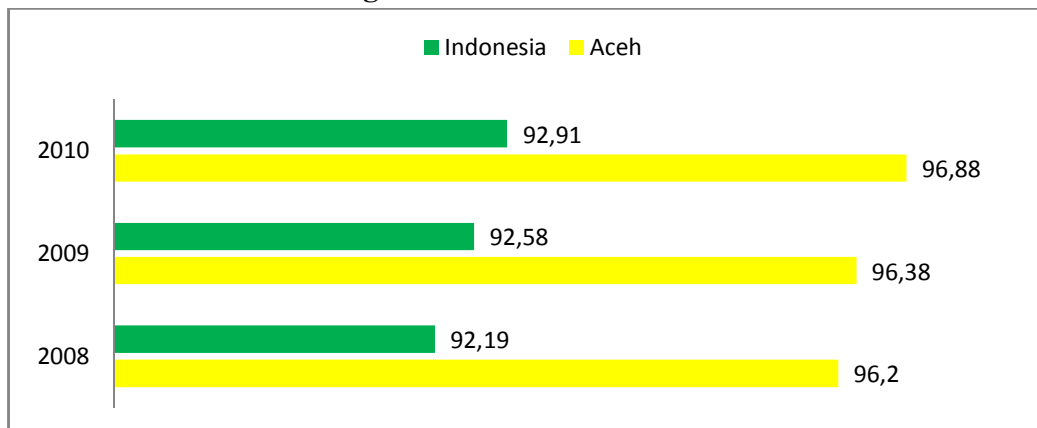


Sumber: Sensus Penduduk (2010), Aceh Dalam Angka (2011), dan BPS (2011).

Angka Melek Huruf (AMH)

Kondisi output pendidikan Aceh juga dapat dilihat dari persentase penduduk yang mampu membaca dan menulis (Angka Melek Huruf), yaitu dengan tingkat rata-rata AMH penduduk Aceh dan Indonesia, masing-masing adalah 96,49 persen dan 92,56 persen. AMH penduduk Aceh terus mengalami peningkatan dari 96,20 persen hingga 96,88 persen selama 2008- 2010. Bahkan angka ini telah melebihi capaian AMH Indonesia sebesar 92,19 - 92,91 persen seperti terlihat pada (Gambar 5).

Gambar 5. Angka Melek Huruf Aceh dan Indonesia

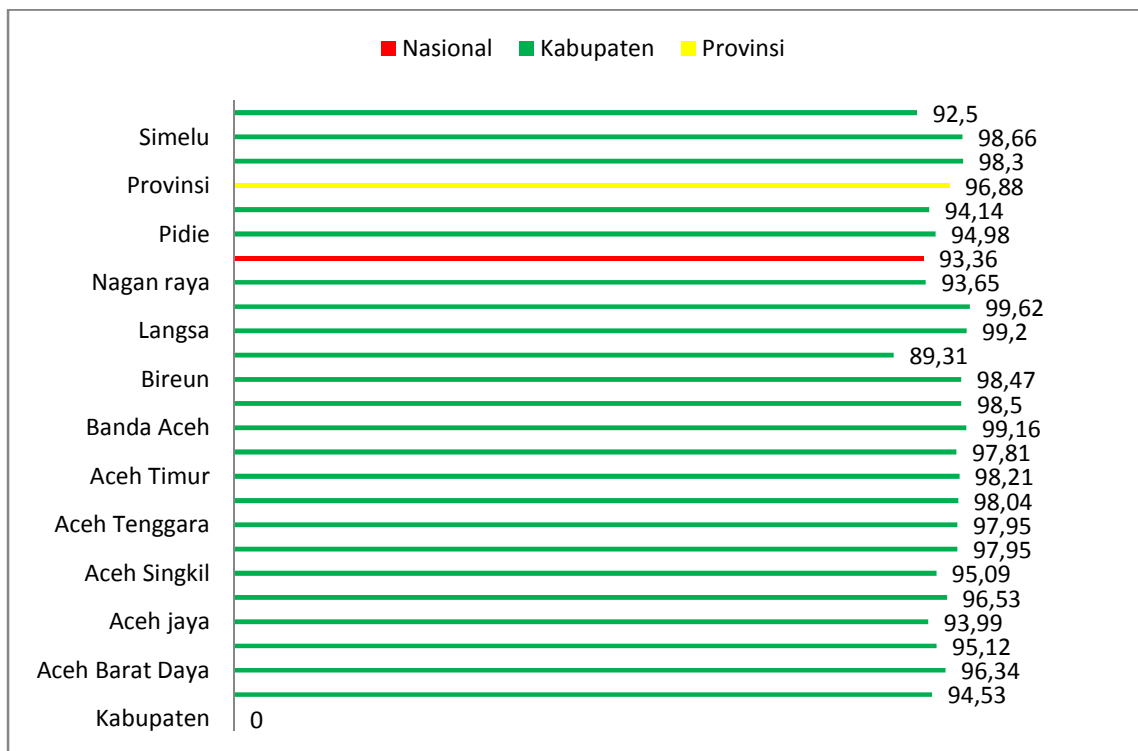


Sumber: Sensus Penduduk (2010), Aceh Dalam Angka (2011), dan BPS (2011).



Berdasarkan Gambar 5, AMH penduduk 15 tahun ke atas di provinsi Aceh terus mengalami peningkatan dari 96,2 di tahun 2008 ke 96,88 di tahun 2010. AMH Aceh tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan AMH nasional yang hanya sebesar 93,36. Hal ini disebabkan semakin baiknya sarana dan prasarana pendidikan akibat semakin besarnya alokasi dana untuk pendidikan Aceh sehingga penduduk Aceh semakin mudah mengakses sentra-sentra pendidikan.

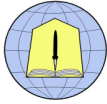
Gambar 6. Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Aceh



Sumber: Statistik Kesra Aceh (2010) dan BPS (2010).

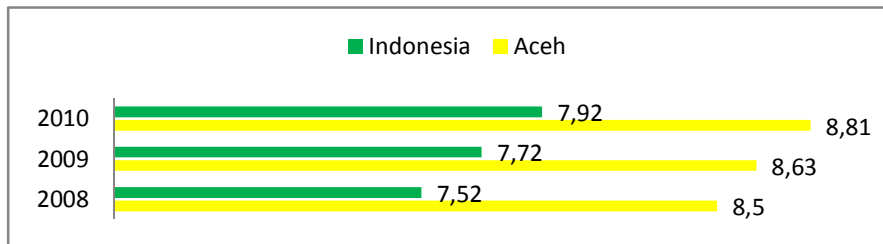
Jika dianalisis AMH ini per-kabupaten/kota di Aceh, jelas terlihat bahwa AMH ini berbeda antar berbagai kabupaten/kota di provinsi Aceh (Gambar 6). Kesenjangan AMH penduduk Aceh sangat jelas terlihat antara kabupaten lama dengan kabupaten yang baru dimekarkan. Kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk, seperti Subulussalam, Benar Meriah, Aceh Jaya, Pidie Jaya, Nagan Raya, Gayo Lues, Aceh Tamiang dan Aceh Barat Daya ini memiliki porsi APBD untuk sektor pendidikan yang masih relatif kecil dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lama. AMH penduduk 15 tahun ke atas provinsi Aceh yang tertinggi diraih kabupaten Lhokseumawe, yaitu sebesar 99,62, dan angka terendah berada pada kabupaten Gayo Lues, yaitu sebesar 89,31.

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS)



Indikator pendidikan lainnya juga dapat dilihat dari Angka Rata-rata Lamanya Sekolah (ARLS) seseorang penduduk. Pada skala nasional, pemerintah Indonesia telah mencanangkan program sekolah 9 tahun. Gambar 7 menunjukkan ARLS Aceh dibandingkan dengan ARLS nasional.

Gambar 7. Rata-Rata Lama Sekolah Aceh dan Indonesia



Sumber: Sensus Penduduk (2010), Statistik Kesra Aceh (2010) dan BPS (2011).

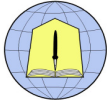
Dari Gambar 7 terlihat bahwa secara nasional wilayah Aceh memiliki ARLS yang lebih tinggi dari ARLS nasional, dimana untuk tingkat nasional pada tahun 2008 tercatat hanya 7,52 tahun, sedangkan ARLS penduduk Aceh mencapai 8,5 tahun, ARLS ini terus meningkat baik pada level nasional maupun provinsi Aceh. Pada tahun 2009 dan 2010 ARLS Aceh, masing-masing 8,63 dan 8,81 tahun. Sedangkan ARLS nasional pada tahun yang sama adalah 7,72 dan 7,92 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa ARLS Aceh pada tahun 2008-2010 hampir mencapai target wajib belajar 9 tahun. Ini adalah sebuah capaian yang menggembirakan bagi Aceh dibandingkan dengan capaian rata-rata 34 provinsi lain di Indonesia.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Indikator keberhasilan pendidikan juga dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK). APK ini dihitung dengan membagi jumlah murid dengan jumlah penduduk menurut kelompok usia sekolah yang sesuai dikalikan 100 persen. APK ini digunakan karena mengingat masih tingginya siswa berusia lebih tua dari kelompok usia semestinya sehingga terlihat perbedaan dengan APM di tingkat SD, SLTP dan SMU lebih rendah dibandingkan dengan APK-nya.

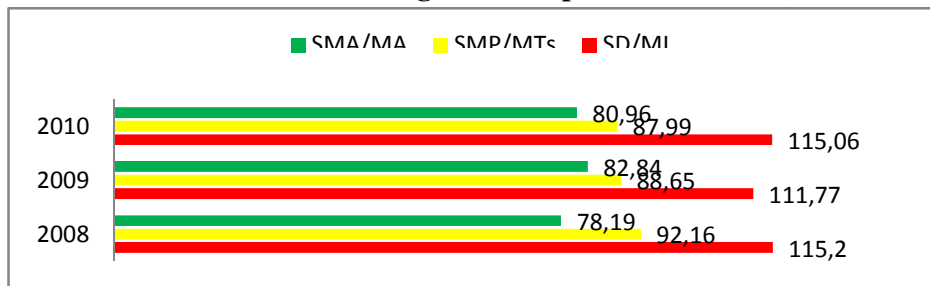
Data Aceh dari tahun 2007 sampai dengan 2010 menunjukkan bahwa adanya penurunan APK. Ini karena bertambahnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan sehingga mereka memasukkan anak ke sekolah menurut usia sekolah. Namun untuk tingkat SD/MI APK dari empat tahun terakhir ini menunjukkan bahwa anak-anak yang berusia di atas 12 tahun masih banyak yang masih/ sedang dalam pendidikan dasar terutama di daerah-daerah pedesaan yang akses transportasi ke sekolah agak sukar.

Merujuk pada Gambar 8, dibandingkan dengan rata-rata APK tingkat SD/MI (114,01 persen) selama periode 2008-2010, rata-rata APK pada SMA/MA dan SMP/MTs di Aceh pada periode yang sama adalah jauh lebih rendah, yaitu hanya 89,60 persen untuk SMA/MA dan 80,66 persen untuk SMP/MTs. Walaupun tingkat APK untuk SD/MI relatif tinggi, namun secara



keseluruhan rata-rata APK Aceh pada tahun 2010 (109,59 persen) jauh lebih rendah (baik) dibandingkan dengan rata-rata APK nasional (115,80 persen). Relatif tingginya rata APK untuk SD/MI menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak usia SD/MI di Aceh yang melanjutkan sekolah diluar usia jenjang pendidikannya. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa masih ada sekolah di Aceh yang tidak bisa diakses karena jaraknya dengan desa, terutama didaerah pedesaan dan banyaknya sekolah-sekolah yang dibakar selama konflik, 1989-2004, dan rusak ketika musibah tsunami 2004. Melihat dana pemerintah yang disalurkan untuk pendidikan, perbaikan jalan, sarana dan prasarana pendidikan dan kondisi keamanan Aceh yang semakin terjamin pasca ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* (MoU) di Helsinki antara Aceh dan Jakarta, maka pada tahun-tahun mendatang angka ini diperkirakan akan naik secara signifikan.

Gambar 8. Angka Partisipasi Kasar (APK)



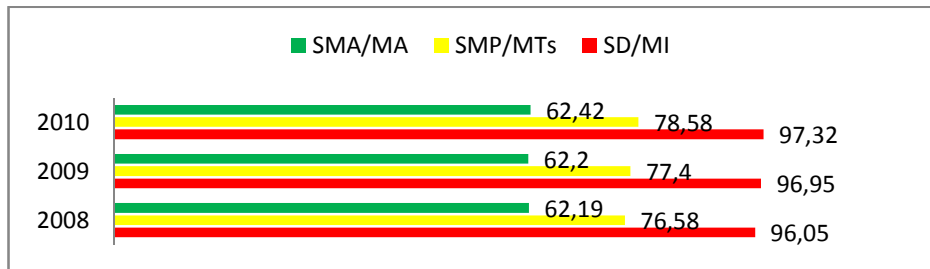
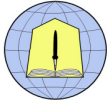
Sumber: Sensus Penduduk (2010), Aceh Dalam Angka (2011) dan BPS (2011).

Angka Partisipasi Murni (APM)

Indikator keberhasilan pendidikan di suatu daerah selanjutnya juga dapat dilihat pada Angka Partisipasi Murni (APM) baik di tingkat dasar SD/MI ataupun di tingkat menengah. Angka Partisipasi Murni (APM) ini diperoleh dengan membagi jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu dengan jumlah penduduk menurut kelompok usia yang sama dikalikan 100 persen.

Berdasarkan Gambar 9, APM provinsi Aceh selama 2008-2010 memperlihatkan bahwa APM tingkat SD/MI jauh lebih tinggi dibandingkan dengan APM tingkat SMP/MI dan juga APM tingkat SMA/MA. APM terus mengalami peningkatan untuk semua jenjang pendidikan, disebabkan di antara lain oleh program-program pembangunan yang mendukung sektor pendidikan, seperti pembangunan jalan-jalan desa sehingga akses dan pemerataan pendidikan lebih terjangkau. Program-program yang diluncurkan oleh pemerintah daerah terutama yang menyangkut dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan seperti penambahan gedung sekolah, pelatihan guru ke Malaysia dan Australia dan penyediaan beasiswa telah mendorong naiknya APM ini. Ini juga menunjukkan bahwa program nasional Wajib Belajar 9 tahun untuk tingkat dasar dan SLTP berjalan dengan baik.

Gambar 9. Angka Partisipasi Murni (APM)



Sumber: Sensus Penduduk (2010), Aceh Dalam Angka (2011), dan BPS (2011).

Di sisi lain, perbedaan tingkat partisipasi sekolah masih terjadi antar kabupaten/kota di Aceh yang sangat beragam. Kota dan kabupaten yang terletak di pesisir Utara dan Timur menunjukkan APM yang lebih tinggi dibandingkan dengan APM di daerah Barat, Selatan Aceh. Hal ini diperkirakan karena sekolah menengah cenderung lebih terkonsentrasi di daerah Utara dan Timur Aceh akibat kepadatan penduduk di kawasan ini, dan juga mudahnya akses transportasi ke kota kabupaten dan kecamatan ke sekolah-sekolah.

Indikator Pendidikan Lainnya

Di samping indikator pendidikan di atas, Tabel 1 berikut ini melaporkan capaian sektor pendidikan di Aceh berbanding capaian pendidikan nasional. Tabel 1 ini dapat digunakan untuk menilai dan mengevaluasi capaian prioritas nasional tahun 2010, 2011 dan kemajuan pelaksanaan tahun 2012 (Triwulan II), khususnya untuk indikator ARLS, APM, APK, persentase kelulusan ujian nasional SD/ sederajat dan SMP/ sederajat, serta AMH.

Tabel 1. Indikator Pendidikan Aceh

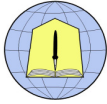
Indikator	2010	2011	2012	Sumber Data
Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	8,81	8,85	8,82	DPA dan BPS Aceh (diolah)
Angka Partisipasi Murni (APM):				
- SD/MI	94,67	94,82	94,71	DPA dan BPS Aceh (diolah)
- SMP/MTs	78,58	78,70	78,75	DPA dan BPS Aceh (diolah)
Angka Partisipasi Kasar (APK):				
- SD/MI	99,92	99,95	99,96	DPA
- SMP/MTs	98,78	99,13	99,43	DPA
Persentase Kelulusan Ujian Nasional SD	99,92	99,95	99,96	DPA
Persentase Kelulusan Ujian Nasional SMP	98,78	99,13	99,43	DPA
Angka Melek Huruf (AMH)>15 tahun	96,88	96,95	97,00	DPA dan BPS Aceh (diolah)

Sumber: Sensus Penduduk (2010), Aceh Dalam Angka (2011), dan BPS (2011).

Nota: DPA = Dinas Pendidikan Aceh.

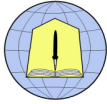
Berdasarkan Tabel 1, berikut ini dijelaskan beberapa poin penting menyangkut pencapaian sektor pendidikan Aceh.

1. ARLS Aceh selama tahun 2010 – 2012 mengalami peningkatan, dan diharapkan pada akhir tahun 2012, rata-rata lama sekolah dapat mencapai target nasional, yaitu 9 tahun. Angka



sementara 8,82 tahun tahun 2012 juga sudah melewati angka target kinerja pemerintahan Aceh di sektor pendidikan pada tahun 2012 (sebesar 8,6 tahun).

2. Dari sudut APM, dapat dilihat bahwa APM SD/MI/ sederajat tahun 2010 mencapai 94,67 persen yang telah mendekati target Renstra Nasional dan meningkat pula dibandingkan angka tahun 2009. APM SMP/ sederajat tahun 2010 berada pada posisi 72,81 persen, lebih rendah dibandingkan dengan target Renstra Pendidikan Aceh tahun 2012 sebesar 100%. APM SD/ sederajat tertinggi dimiliki oleh Kota Banda Aceh (117,12 persen) dan Kabupaten Aceh Jaya mencatat APM SD/ sederajat terendah (yaitu 81,97 persen). Kesenjangan indikator ini antar kabupaten/kota di tingkat SMP/ sederajat juga menunjukkan keadaan yang sama, tertinggi dimiliki oleh Kota Banda Aceh (96,82 persen) dan terendah Kabupaten Aceh Jaya (58,59 persen).
3. ARLS Aceh selama tahun 2010 – 2012 mengalami peningkatan, dan diharapkan pada akhir tahun 2012, rata-rata lama sekolah dapat mencapai target nasional, yaitu 9 tahun. Angka sementara 8,82 tahun tahun 2012 juga sudah melewati angka target kinerja pemerintahan Aceh di sektor pendidikan pada tahun 2012 (sebesar 8,6 tahun).
4. Dari sudut APM, dapat dilihat bahwa APM SD/MI/ sederajat tahun 2010 mencapai 94,67 persen yang telah mendekati target Renstra Nasional dan meningkat pula dibandingkan angka tahun 2009. APM SMP/ sederajat tahun 2010 berada pada posisi 72,81 persen, lebih rendah dibandingkan dengan target Renstra Pendidikan Aceh tahun 2012 sebesar 100%. APM SD/ sederajat tertinggi dimiliki oleh Kota Banda Aceh (117,12 persen) dan Kabupaten Aceh Jaya mencatat APM SD/ sederajat terendah (yaitu 81,97 persen). Kesenjangan indikator ini antar kabupaten/kota di tingkat SMP/ sederajat juga menunjukkan keadaan yang sama, tertinggi dimiliki oleh Kota Banda Aceh (96,82 persen) dan terendah Kabupaten Aceh Jaya (58,59 persen).
5. Pada tahun 2010, APK SD/ sederajat di Aceh mencapai 113,27 persen, dan mendekati APK nasional sebesar 116,77 persen. Capaian APK pada tahun 2010 ini dinilai masih lebih baik dibandingkan dengan capaian indikator yang sama pada tahun 2009 sebesar 109,59 persen.
6. Angka putus sekolah SD/ sederajat pada tahun 2010 hanya 0,7 persen. Angka ini relatif rendah (di bawah satu persen) dari Renstra Pendidikan Aceh dan diharapkan dapat ditekan pada tahun-tahun mendatang. Meskipun angka nol persen sulit untuk dicapai, namun angka putus sekolah harus terus diupayakan untuk semakin mendekati angka nol persen. Sedangkan angka putus sekolah SMP pada tahun 2010 adalah 0,4 persen, jauh lebih rendah dibandingkan angka putus sekolah tingkat SD. Pemerintah Aceh hendaknya dapat mempertahankan angka yang rendah ini, dan jika memungkinkan dapat ditekan agar semakin mendekati angka nol.



7. APM dan APK untuk SD/ sederajat pada tahun 2010 semakin mendekati target Renstra Nasional tahun 2014. Sedangkan APM dan APK SMP/ sederajat Aceh bahkan pencapaiannya sudah melewati target Renstra Nasional tahun 2014. Hal ini patut dipertahankan agar pada tahun 2014, Aceh memiliki lebih banyak SDM yang memiliki pendidikan setingkat SMA.
8. Keterlibatan siswa perempuan di Aceh pada semua jenjang semakin membaik. Rasio partisipasi siswa perempuan dalam dunia pendidikan di Aceh tahun 2009 dan 2010 menunjukkan perbaikan, di mana jumlah siswa perempuan lebih banyak dari siswa pria. Namun, partisipasi perempuan pada sekolah kejuruan seperti SMK masih rendah, di mana jumlah siswa perempuan kira-kira separuh jumlah siswa pria.

Pembiayaan Pendidikan

Komitmen pemerintah pusat dan Aceh terhadap pembangunan sektor pendidikan semakin mendapat prioritas dalam masa reformasi ini, dimana ditandai dengan peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan. Pemerintah Pusat sudah mengalokasikan 20 persen (Rp 213triliun) dari APBN tahun 2010 yang berjumlah sekitar Rp 1.100 triliun ke sektor pendidikan. Begitu juga dengan komitmen pemerintah Aceh untuk mendukung pembangunan sektor pendidikan dengan mengalokasikan minimal 20 persen dari APBA-nya yang berjumlah Rp 11,9 pada tahun 2010 dan Rp 9,6 triliun pada tahun 2011 untuk sektor pendidikan.

Berdasarkan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerinthan Daerah (ILPPD) Pemerintahan Aceh (2011), total belanja pendidikan Aceh pada 2011 yang dapat direalisasikan adalah Rp 990,06 milyar dari pagu Rp 1,05 triliun. Anggaran pendidikan ini dialokasikan ke para penyelenggara urusan pendidikan Aceh, yang terdiri dari: Dinas Pendidikan, Badan Pembinaan Pendidikan Dayah, Majelis Pendidikan Daerah, Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda Aceh), serta Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Berikut ini adalah unit penyelenggaraan program dan kegiatan pendidikan Aceh beserta realisasi dananya:

1. Dinas Pendidikan dialokasikan Rp 853,23 milyar dengan realisasi Rp 797,18 milyar. Dana ini digunakan untuk program dan kegiatan Dinas Pendidikan terdiri dari program pendidikan anak usia dini, program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, program pendidikan menengah, program pendidikan non formal, program pendidikan luar biasa, program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, dan program manajemen pelayanan pendidikan.
2. Badan Pembinaan Pendidikan Dayah dialokasikan Rp 98,96 milyar, dan realisasinya Rp 97,05 milyar. Dana ini digunakan untuk program dan kegiatan pendidikan dayah dan program peningkatan sarana dan prasarana dayah.



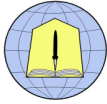
3. Majelis Pendidikan Daerah dengan alokasi Rp 4,55 milyar, dan realisasinya Rp 4,20 milyar.
4. Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh dialokasikan dana Rp 649,74 juta, dan realisasinya Rp 516,52 juta; untuk program peningkatan kualitas kelembagaan dan program peningkatan kualitas pendidikan agama.
5. Komisi Beasiswa Aceh dengan alokasi dana sebesar Rp 92,23 milyar dengan realisasi sebesar Rp 89,53 milyar; untuk penyediaan beasiswa dalam dan luar negeri.
6. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan adalah program pembinaan dan pengembangan aparatur, dengan anggaran Rp 1,63 milyar, dan realisasinya Rp 1,58 milyar atau 96,67%.

Walaupun dana yang dialokasikan untuk sektor pendidikan Aceh telah mampu menaikkan peringkat pendidikan Aceh dalam aspek AMH, ARLS, dan APM di level nasional, namun kualitas pendidikan masih sangat memprihatinkan. Rangkaian pendidikan Aceh menduduki peringkat 28 dari 34 provinsi. Demikian juga dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh anjlok dari peringkat 17 pada 2009 ke peringkat 27 pada 2010. Ini sangat ironis mengingat dana mengalir ke Aceh cukup besar. Sayangnya, rata-rata kabupaten/kota menggunakan 67% anggaran pendidikan untuk gaji guru, malah ada kabupaten/kota yang menghabiskan dana pendidikan melebihi dari 85% untuk gaji guru, sebaliknya sangat minim untuk peningkatan kualitas.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Depdiknas pada 2012, tingkat kelulusan pada tingkat SMP di provinsi Aceh pada tahun 2012 mencapai 99,42% dan berada pada ranking 21 nasional, sedangkan MTs tingkat kelulusan sebesar 99,27% dan berada pada ranking 26 nasional. Pada tingkat SMA jurusan IPA tahun 2012 tingkat kelulusan 99,75% berada pada ranking 23 nasional untuk SMA jurusan IPS tingkat kelulusan 98,81%, berada pada ranking 25 nasional, dari 34 provinsi di Indonesia. Pada lembaga MA jurusan IPA dengan tingkat kelulusan sebesar 99,78%, berada pada ranking 17 nasional. Sedangkan MA jurusan IPS dengan tingkat kelulusan 98,21%, berada pada ranking 18 nasional. Pada jenjang SMK tingkat kelulusan Aceh sebesar 98,59% berada pada ranking 26 nasional dari 34 provinsi di Indonesia.

Memang bila diukur dari kelulusan Ujian Nasional (UN), peringkat pendidikan Aceh sudah sangat menggembirakan. Pada 2011 lalu, misalnya, kelulusan SMP/MTs mencapai 99,38%, SMA/MA IPA 99,76% dengan rangking nilai 22% dari 34% dan SMA/MA IPA mencapai 98,89% dengan rangking 21 dari 34 provinsi. Namun bila capaian-capaian di atas kita bandingkan dengan daya saing lulusan terjadi kontradiksi. Rangkaian nilai yang diperoleh SMA/MA/SMK yang mengikuti SMPTN di berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia pada 2011 untuk IPA menduduki rangking 31 (di bawah Papua), dan untuk IPS menduduki rangking 25.

Rendahnya kualitas siswa di Aceh berkorelasi positif dengan kemampuan dan kualitas guru. Hasil Uji Kompetensi Awal (UKA) guru di Aceh pada tahun 2011 sungguh



memprihatinkan. Guru TK mencapai nilai rata-rata 36,26 (ranking 32), guru SD nilai rata-rata 35,95 (rangking 32), guru SMA rangking 31, dan guru SMK rangking 29 dari 34 provinsi (Adam, 2012, dan Wahab Gam, 2012). Fakta ini menggambarkan bahwa rata-rata kemampuan guru berkisar rangking 30, maka hasil belajar siswa juga berkisar pada wilayah tersebut. Ini menunjukkan bahwa untuk meningkat mutu siswa Aceh mutlak harus dimulai dengan perbaikan kemampuan dan kualitas para guru, khususnya dengan mengadakan program intensif pelatihan guru baik dilakukan di daerah, di luar Aceh maupun di luar negeri. Program peningkatan lulusan guru juga harus mendapat perhatian serius dari pemerintah dengan menyediakan beasiswa bagi para guru untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi.

Pendidikan dan Kemiskinan

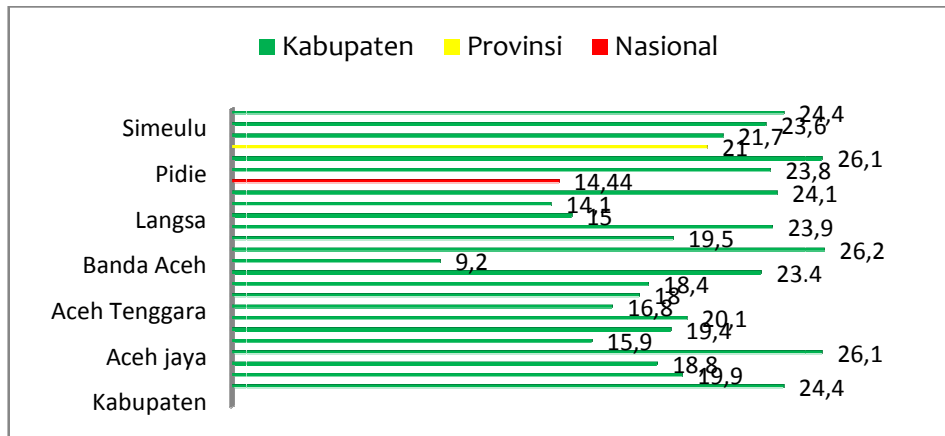
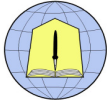
Pendidikan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah dan negara. Daerah yang memiliki penduduk yang berpendidikan tinggi akan memiliki modal yang besar untuk melaksanakan pembangunan dengan maksimal karena semakin tinggi pendidikan masyarakat, maka keterlibatan mereka dalam program pembangunan akan semakin terarah dan optimal. Sebaliknya, semakin banyak penduduk yang tidak berpendidikan, maka akan semakin menghambat proses pembangunan suatu daerah, dan bahkan semakin dekat dengan kemiskinan. Karena kemiskinan itu sendiri merupakan salah satu faktor yang dapat pertumbuhan ekonomi. Daerah yang memiliki penduduk miskin yang besar, maka alokasi dana akan lebih banyak untuk mengatasi kemiskinan tersebut, sehingga semakin sedikit dana yang tersedia untuk membangun sektor-sektor ekonomi lainnya, yang pada gilirannya akan menghambat pembangunan ekonomi.

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki persentase penduduk miskin terbanyak nomor tujuh di level nasional, padahal APBD Aceh berada di rangking nomor tiga terbanyak dibandingkan dengan 34 provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Gambar 10 berikut menjelaskan persentase penduduk miskin di setiap kabupaten/kota di Aceh dan perbandingannya dengan tingkat kemiskinan provinsi dan nasional.

Berdasarkan Gambar 10, jelas terlihat bahwa pada tahun 2010, rata-rata persentase penduduk miskin nasional mencapai angka 14,44 persen, jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata penduduk miskin di provinsi Aceh yang mencapai 21 persen. Walaupun secara umum provinsi Aceh telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari tahun 2009 yang mencapai 21,8 persen menjadi 20,3 persen pada tahun 2010, namun tingkat penduduk miskin Aceh masih jauh lebih tinggi berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan penduduk Indonesia.

Kalau dilihat tingkat penduduk antar kabupaten/kota di Aceh, jelas terlihat bahwa pada tahun 2009 persentase penduduk miskin yang tertinggi berada di Kabupaten Pidie Jaya, yaitu 28 persen, dan yang terendah berada di Kota Banda Aceh, yaitu 8,6 persen. Sedangkan persentase penduduk miskin terbesar pada tahun 2010 terdapat di Kabupaten Bener Meriah yang mencapai 26,2 persen, dan persentase penduduk miskin terkecil terdapat di Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota provinsi Aceh, yang hanya 9,2 persen, dan jauh lebih baik dibandingkan dengan tingkat kemiskinan pada level nasional.

Gambar 10. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Aceh



Sumber: Aceh Dalam Angka (2011), dan BPS (2011).

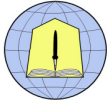
Selanjutnya, jika dilihat dari jumlah penduduk miskin di 23 kabupapen/kota di Aceh jelas terlihat bahwa kabupaten/kota yang memiliki tingkat pendidikannya rendah, khususnya untuk jenjang DIII, S1, S2 dan S3 (lihat Gambar 2, 3, dan 4), maka jumlah penduduk miskinnya juga relatif banyak. Ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi akan mampu menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat Aceh, dan pada gilirannya akan mampu mendongkrak pembangunan ekonomi. Prioritas pemerintah Aceh untuk membangun sektor pendidikan sudah sangat tepat, namun program pembangunan sektor pendidikan hendaklah tidak hanya difokuskan pada peningkatan kuantitas penduduk terdidik, tapi juga pada peningkatan mutunya.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Pendidikan merupakan faktor utama dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia khususnya di Indonesia, karena pendidikan menjadi kunci bagi pencapaian kemajuan bangsa. Tingkat pendidikan yang rendah menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya produktifitas yang berimbas pada buruknya tingkat penghasilan dan buruknya kualitas kehidupan.

Dunia pendidikan di Provinsi Aceh sudah baik dan bahkan menggembirakan, terlihat dari AMH, ARLS, APM, yang telah berada di atas level nasional. Walaupun demikian, masih terdapat kabupaten/kota di Aceh (umumnya kabupaten/kota yang baru dimekarkan) yang masih memiliki AMH, ARLS dan APM yang rendah dan malah berada di bawah level provinsi dan nasional. Walaupun indikator pendidikan di kebanyakan kabupaten/kota di Aceh sudah baik, namun mutunya masih sangat memprihatinkan, mutu lulusan SD/ sederajat sampai dengan SMA/ sederajat rata-rata berada di rangking 30 dari 34 provinsi di Indonesia. Rendahnya mutu lulusan SD/ sederajat sampai dengan SMA/ sederajat semata-mata disebabkan oleh rendahnya kemampuan dan mutu guru, yang juga berada rata-rata di peringkat 30 nasional. Ini sangatlah ironis, mengingat dana yang dialokasikan untuk sektor pendidikan di Aceh sangat besar. Dana ini belum mampu meningkatkan kualitas para guru dan juga kualitas murid, dapat dikatakan



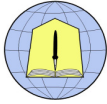
bahwa dana yang besar akan tetapi mutunya masih sangat rendah. Dengan kata lain, dana yang besar belum mampu digunakan secara optimal untuk mendongkrak mutu pendidikan Aceh.

Rendahnya Tingkat APK, APM, ARLS dan APK di sebagian kabupaten/kota di Aceh, khususnya di Kabupaten yang baru dimekarkan telah menyebabkan tingkat kemiskinan masyarakat di kawasan tersebut sangat tinggi, yaitu melebihi 20 persen (melebihi tingkat kemiskinan nasional, 14,44 persen). Di samping itu, jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan D IV/S1 di kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan provinsi dan nasional tersebut adalah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk yang berdomisili di kota/kabupaten lainnya yang memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Kesenjangan tingkat dan mutu pendidikan antar kabupaten/kota ini telah berdampak negatif terhadap upaya pemerataan pembangunan di Aceh. Kabupaten/kota dengan tingkat dan mutu pendidikan yang rendah cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa tingkat dan mutu pendidikan berkorelasi negatif dengan tingkat kemiskinan di Aceh.

Rekomendasi

Berikut ini adalah beberapa rekomendasi bagi pemerintah dan dinas terkait dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kualitas pendidikan Aceh, sehingga peningkatan mutu pendidikan Aceh ini diharapkan dapat berkontribusi positif dalam menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat Aceh.

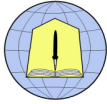
1. Tingkat APM, ARLS, APM penduduk Aceh yang sudah sangat baik dan bahkan berada di atas level nasional harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Begitu juga dengan APK dan angka putus sekolah yang tergolong rendah (baik) harus terus ditekan terutama pada tingkat SD/ sederajat.
2. Peningkatan indikator pendidikan Aceh yang semakin baik dan bahkan telah melewati rata-rata nasional tidak berkorelasi positif dengan peningkatan mutu pendidikan di Aceh. Mutu pendidikan di Aceh yang masih sangat rendah, rata-rata berada di rangking 25 dari 34 provinsi di Indonesia, harus mendapat perhatian serius untuk ditingkatkan. Program pembangunan dunia pendidikan Aceh harus difokuskan pada upaya peningkatan mutu.
3. Program-program peningkatan kualifikasi dan mutu tenaga pendidik dan pendistribusian guru berkualitas antar kabupaten/kota yang lebih merata harus menjadi prioritas pembangunan sektor pendidikan Aceh. Upaya ini dilakukan terutama untuk mengurangi kesenjangan tingkat dan mutu pendidikan antar kabupaten/kota di Aceh. Kesenjangan pembangunan dunia pendidikan antar kota/kabupaten di Aceh harus terus diperkecil, sehingga semua penduduk Aceh akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan sekaligus meningkatkan mutunya.
4. Pemerintah harus mengalokasikan dana pembangunan Aceh untuk sektor pendidikan secara berkeadilan antar kota/kabupaten di Aceh, terutama untuk menunjang program-program peningkatan tingkat dan kualitas sektor pendidikan. Pengalokasian dana pembangunan untuk sektor pendidikan yang proporsional antar kota/kabupaten jelas akan menekan tingkat kemiskinan dan mewujudkan pembangunan yang seimbang antar kabupaten/kota. Meratanya alokasi dana pendidikan akan mengurangi kesenjangan pembangunan sektor pendidikan dan, pada gilirannya, akan mencegah munculnya konflik antar kabupaten/kota akibat kecemburuan pembangunan



5. Pemerintah Aceh, khususnya Dinas Pendidikan harus meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan dana pendidikan. Pengelolaan dan penggunaan dana pendidikan harus dilakukan secara tranparan, profesional dan tepat sasaran sehingga akan menutup celah korupsi dana pendidikan. Hal ini harus mendapat perhatian serius pemerintah karena tingkat korupsi di Aceh sudah sangat parah, paling sedikit mencapai 17,8% dana APBA pada tahun 2011 (Abd. Majid, 2012), dan bahkan telah merambah sektor pendidikan di Aceh.
6. Peningkatan partisipasi murid-murid usia dini pada level PAUD dan TK di Aceh harus ditingkatkan sehingga dapat menumbuhkan dan memupuk minat belajar mereka sejak kecil hingga pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pemerintah Aceh harus mendukung penuh pengelolaan dan pembiayaan institusi PAUD/ sederajat dan TK/ sederajat yang ada di Aceh. Di samping itu, pemerintah Aceh juga harus memperluas pendidikan inklusif yang professional dan berkualitas bagi bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus di Aceh.
7. Di samping itu, standar minimum pelayanan pendidikan Aceh harus diperhatikan dan terus ditingkatkan. Dalam hal ini, pemerintah Aceh harus mengadakan berbagai bentuk *training* dan workshop kepada para tenaga pendidik yang memegang jabatan administrasi untuk meningkatkan kapasitas *managerial skill* mereka dalam bidang administrasi pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. Zaini.(2012). *Informasi Laporan Penyelenggaran Pemerinthan Daerah (ILPPD) Pemerintahan Aceh (2011)*, Banda Aceh: Kantor Gubernur Aceh, Indonesia.
- Aceh Dalam Angka (2008 - 2012).
- Abd. Majid, M. Shabri. (2004). *Mengembalikan Citra dan Ruh Pendidikan Aceh*. http://www.acehinstitute.org/artikel/ilmiah_shabri_mengembalikan_roh_pendidikan_aceh.htm. Di unduh pada 12 Juni 2010.
- Abd, Majid, M.Shabri.(2012). “Menyelamatkan Aceh dari Korupsi”, *Serambi Indonesia*, 23 Oktober 2012.
- Adam, Anas M. (2012). “Pendidikan Aceh Mau Kemana”, *Serambi Indonesia*, 10 September 2012.
- Badan Pusat Statistik (2008-2012).
- Chamidi, Safrudin. (2005). *Makna dan Aplikasi Sederhana Indikator Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Badan Pendidikan dan Pengembangan, Pusat Data dan dan Informasi Pendidikan, Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi.
- Depdiknas. (2012). Laporan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Jakarta: Depdiknas.
- Dewey, John.(1944). *Democracy and Education*.The Free Press, hal. 1–4.
- Global Monitoring Report. (2011). *”The Hidden Crisis, Armed Conflict and Education”*. USA: UNESCO.
- Mankiw, N.Gregory, Romer, David, and Weil, David.(1992). “A contribution to the empirics of economic growth”, *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 107, 2, hal.407-437.



-
- Samuelson, P dan Nordhaus.(2005). *Economics*. Eighteenth Ed., USA: Mc Graw-Hill, (International Edition).
- Sensus Penduduk (2010).
- Sofyan Djalil dan Ratna Megawangi. (2006).“Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implimentasi Model Pendidikan Holistik Berbasis Karakter”, *Orasi Ilmiah*, disampaikan pada Rapat Terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-45 Unsyiah, 2 September.
- Sukirno, Sadono. (2004). *Pengantar Teori Makroekonomi*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- The World Economic Forum Report.(2000). Swedia.
- Todaro, M.P. & Smith, S.C. (2003). *Economic Development*. Boston: Addison Wesley.
- United Nation Development Programme (UNDP). (2011). *Human Development Report (HDR), 2011*. http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Table2.pdf. Diunduh, 12 Juni 2012.
- Wahab Gam, Mohd Ilyas. (2012). Menakar Mutu Pendidkan Aceh, *Serambi Indonesia*, 24 Oktober 2012.